



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PURWITO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
GORONTALO
3. NHK : 711682

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 313.478.200

1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/87 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 146.835.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 81.825.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/85 m2 di KAB / KOTA BANJAR, Rp. 32.724.000
4. Tanah Seluas 373 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 52.094.200

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 208.000.000

1. MOBIL, GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA R15 BK6 R M/T/2020 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G A/T 2021 Tahun 2021, HIBAH TANPA AKTA Rp. 95.000.000
5. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	147.730.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	38.765.499
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	389.590.233
F. HARTA LAINNYA	Rp.	704.417.837
Sub Total	Rp.	1.801.981.769
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.801.981.769

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.